

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
KEBERLANGSUNGAN KEGIATAN EKONOMI BERGULIR PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN (PNPM-MP) KELURAHAN PANGGUNGREJO,
KEC.TULUNGAGUNG, KAB.TULUNGAGUNG**

Oleh:

Yeni Tarista, Hikmah Eva Trisnantari, Abdul Manab.

ABSTRAK: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah program pemerintah yang memberdayakan masyarakat di tiga bidang yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari ketiga kegiatan tersebut kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang terus berjalan dan berkembang sampai saat ini walaupun program PNPM Mandiri Perkotaan telah berakhir di tahun 2015. Partisipasi semua pihak diperlukan untuk mempertahankan kegiatan ekonomi bergulir. Partisipasi kegiatan ekonomi bergulir diatur dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam perencanaan ekonomi bergulir, kegiatan perencanaan dilakukan mulai tingkat kelurahan dan tingkat basis kehadiran partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat semakin sedikit dari tahun ketahun. Masyarakat tidak runtut dalam mengikuti kegiatan perencanaan sehingga mereka tidak tahu maksud dan tujuan tahapan perencanaan. Pelaksanaan ekonomi bergulir sudah sesuai dengan pedoman namun tidak adanya pengawas dalam struktur LKM, menyebabkan kinerja UPK lebih berat dalam menangani KSM. Dana mengendap dikarenakan rekomendasi dari fasilitator agar KSM peminjam yang menunggak di tertibkan terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi juga sudah dilakukan dengan mengikuti kegiatan RWT namun penempelan di 5 titik tidak dilakukan sehingga pemantauan oleh masyarakat tidak bisa berjalan rutin tiap bulan.

Kata Kunci: Partisipasi, Ekonomi bergulir, PNPM Mandiri Perkotaan

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di tanah air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997 sampai 1999. Menurut Simandjuntak dan Pasaribu (1982 : 246) kemiskinan disebabkan ada 3 unsur yaitu kemiskinan yang disebabkan mental seseorang, bencana alam dan kemiskinan buatan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek

yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dari seluruh program penanganan kemiskinan, program pemberdayaan merupakan program yang tepat untuk meningkatkan motivasi seseorang untuk menentukan pilihan hidup.

Menurut Theresia, A dkk (2014:117) “Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya”. Program pemberdayaan dari pemerintah yang langsung terjun ke kelurahan dan desa adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah padanan kata partisipasi adalah peran serta. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Model partisipasi masyarakat di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini bisa disebut partisipasi interaktif. “Partisipasi interaktif mempunyai karakteristik masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman prespektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis, masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan” (Hobley dalam Theresia,A dkk, 2014: 205).

Pelaksanaan kegiatan Ekonomi Bergulir bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM)/ Unit Pengelola Keuangan (UPK) berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2 (Pemetaan Swadaya yang tercantum dalam Program Jangka Menengah). Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain.

Dan pengelolaan ekonomi terus berjalan karena walaupun anggota Lembaga Kswadayaan Masyarakat (LKM) berganti, selama Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam kondisi baik maka Unit Pengelola Keuangan (UPK) tidak akan diganti. Padahal seluruh kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) sangat bergantung pada keputusan dari Lembaga Kswadayaan Masyarakat (LKM). Dan berdasarkan laporan Unit Pengelola Keuangan (UPK) bulan April 2016 kondisi Unit Pengelola Keuangan (UPK) saat ini, ada dana yang macet sebesar Rp 72.000,00 dana yang bergulir di masyarakat sebesar Rp 159.975.000,00 yang dipinjam oleh 31 kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri 152 kepala keluarga. Selain dana tersebut ada juga dana yang masih mengendap di bank sebesar Rp44.038.987,71. Seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di jalankan berdasarkan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan petunjuk teknis PNPM Mandiri Perkotaan, namun apakah kegiatan yang terlaksana di lapangan sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan petunjuk teknis PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk itu penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi bergulir.

Focus Penelitian

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan kegiatan ekonomi bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di kelurahan Panggungrejo?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di kelurahan Panggungrejo?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengendalian (pemantauan dan evaluasi) pada kegiatan ekonomi bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di kelurahan Panggungrejo?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Manab (2014:5) Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku, proses interaksi, makna suatu tindakan, nilai, pengalaman individu atau kelompok yang semuanya berlangsung dalam latar alami. Teori yang menunjang penelitian ini adalah fenomenologi. Menurut Moleong (2011:17) peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada pada situasi-situasi tertentu. Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus. Menurut John W. Creswell (2008: 19) ” Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Peneliti sebagai *human instrumen* atau pengumpul data, sehingga peneliti dituntut untuk dapat memahami berbagai perilaku, interaksi antar subjek, aktifitas, gerak, mimik, nilai-nilai, simbol, atau apapun yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti (Idrus, 2009: 26). Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, hidup dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian (Moleong, 2011: 134).

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebagai salah satu penerima program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Penelitian mengarah pada kegiatan ekonomi bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) dari Lembaga Kswadayaan Masyarakat SIDO MAKMUR, Kelurahan Panggungrejo.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman

wawancara atau juga dengan menggunakan taperecorder atau juga dengan kertas yang sudah disiapkan sebelumnya.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi, (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap penyusunan laporan. Uraian dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap persiapan

- a) Pada tahap ini peneliti melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
- b) Menetapkan Judul Dan Fokus Penelitian
- c) Melakukan observasi lapangan dengan melakukan dialog dengan Kepala kelurahan, Pimpinan kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) SIDOMAKMUR, Unit Pengelola Keuangan (UPK) (Unit Pengelola Keuangan), Fasilitator Kelurahan bidang ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan.
- d) Menetepkan Informan
- e) Menyiapkan Pedoman Observasi Dan Wawancara
- f) Penyusunan Proposal
- g) Seminar Proposal

Tahap pelaksanaan

- a) Pengurusan perizinan
- b) Pelaksanaan observasi ke dokumen LKM (Lembaga kswadayaan masyarakat)
- c) Pelaksanaan observasi guna mengamati kegiatan pembayaran angsuran dan pencairan
- d) Pelaksanaan wawancara kepada kepala kelurahan, LKM (Lembaga Kswadayaan Masyaraat) dan UPK (Unit Pengelola Keuangan)
- e) Pelaksanaan wawancara kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
- f) Pengolahan data dengan reduksi data, display dan analisis data
- g) Menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi

Tahap penyusunan laporan

- a) Melakukan uji keabsahan hasil penelitian.
- b) Menyusun Laporan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen Lembaga Kswadayaan masyarakat dan dokumen pembukuan Unit Pengelola Keuangan (UPK), yang berupa arsip pembukuan Unit Pengelola Keuangan (UPK), Proposal kegiatan ekonomi bergulir, foto-foto kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang telah dilakukan, berita acara dan daftar hadir kegiatan.

Menurut Hamidi (2010:221) “Analisis data adalah langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan, pengelompokkan (memilah) data untuk tujuan menarik kesimpulan”. Penelitian ini menggunakan teknik analisa explanation building. explanation building yaitu tehnik penjelasan hasil wawancara dan analisis checklist hasil observasi serta penulurusan dokumen. Tujuannya adalah menganalisis dengan menjelaskan pemikiran logis dari kasus yang diteliti secara naratif. Penjelasan yang merefleksikan proposisi teoritis, membuat semakin kuat kasus itu dijelaskan, dan semakin dapat meyakinkan pembaca akan “kebenaran” penelitian. Menurut Manab (2015:301) pola pembangunan penjelasan / explanation building dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat pernyataan teoritis awal ataupun proposisi awal mengenai kebijakan atau perilaku sosial.
2. Membandingkan hasil penemuan dari kasus awal terhadap pernyataan
3. Memperbaiki pernyataan atau proposisi
4. Membandingkan perbaikan pada fakta

Mengulangi proses ini sebanyak mungkin yang dibutuhkan

Untuk mengecek keabsahan temuan dalam penelitian ini digunakan 4 tahap uji yaitu uji kredibilitas data (validitas internal), uji transferability (validitas eksternal), uji dependability (reliabilitas), uji confirmability (obyektivitas) .

HASIL PENELITIAN

Perencanaan kegiatan ekonomi bergulir terintegrasi dalam perencanaan kegiatan tridaya yaitu ekonomi lingkungan dan sosial. Dan kegiatan perencanaan meliputi PRK (refleksi perkara kritis), PS (pemetaan swadaya), pengorganisasian, dan penyusunan PJM. Dan dilaksanakan di tingkat RT dan kelurahan. Pelaksanaan Refleksi perkara kritis tingkat RT dilaksanakan saat ada yasinan RT sehingga peserta yang hadir banyak, dilihat dari peserta memang banyak dan menghemat pendanaan namun secara penyampaian materi kurang maksimal dikarenakan keterbatasan waktu. Dalam acara tersebut di sampaikan tujuan dari kegiatan Refleksi perkara Kritis (RPK). Di tingkat basis atau RT pelaksanaan Refleksi perkara Kritis (RPK) seharusnya diadakan dalam bentuk FGD (*focus group discussion*) yang dilakukan oleh 3 kelompok yakni kelompok perempuan, kelompok miskin dan kelompok non miskin. Untuk sosialisasi hasil tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan tenaga para relawan, dan masih ada kegiatan siklus yang selanjutnya

Setelah diperoleh kriteria kemiskinan di dapat melangkah ke kegiatan selanjutnya yaitu Pemetaan swadaya, Di kelurahan Pangungrejo kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi Pemetaan Swadaya sedikit dikarenakan mereka merasa sibuk dan kegiatan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Pembentukan tim Pemetaan Swadaya dilaksanakan pada saat sosialisasi tingkat kelurahan untuk menyingkat waktu dan menghemat pembiayaan. Coaching tim pelaksana di tingkat basis di hadir oleh 22 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 12 perempuan, mereka sebagi besar dari unsur RT karena tujuan pemetaan untuk memotret kondisi tiap RT mengkaji masalah masalah yang ada di RT serta mengkaji permasalahan setiap warga yang dianggap miskin di wilayahnya. misalnya di lingkungan pak RT ada orang yang memenuhi kriteria kemiskinan yang disepakati dalam Refleksi Perkara Kritis, namanya pak A bekerja sebagai tukang becak mempunyai 3 tanggungan, istrinya berjualan sayur dan kondisi rumahnya tidak layak sehingga dari kajian tersebut Pak A membutuhkan perumahan yang layak, istrinya membutuhkan akses ekonomi

karena kurang modal, anak-anaknya membutuhkan bantuan pendidikan dan kesehatan.

Dalam pelaksanaan pemetaan swadaya relawan memperoleh data dan rumusan permasalahan warga miskin, perempuan dan laki-laki, menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi berbagai kelompok, termasuk kelompok perempuan, daftar KK dan jiwa miskin, perempuan dan laki-laki, serta permasalahan yang khusus dari masing-masing jiwa. Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta-peta topikal (kesehatan, pendidikan, sarana-prasarana lingkungan, dan sebagainya sesuai kebutuhan), kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat sebagai dasar bagi pemilihan anggota “lembaga Keswadayaan Masyarakat”.

Kebutuhan masyarakat untuk mengakses dana bank yang sulit karena tidak adanya jaminan, dan sangat membutuhkan dana untuk meneruskan usaha bisa dimasukkan kedalam data pemetaan Swadaya. Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk penanggulangan kemiskinan yang demokratis, daftar potensi untuk pemecahan masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan serta aspek gender yang ada di masing-masing masalah, rencana kerja untuk pembangunan LKM dan pengembangan KSM.

Dari nama-nama yang terpilih di rangking antar 1- 13, ke 13 orang tersebut di namakan anggota LKM (Lembaga Kswadayaan masyarakat) yang terpilih. Setelah anggota LKM (Lembaga Kswadayaan masyarakat) terbentuk diadakan pemilihan koordinator LKM, semua LKM (Lembaga Kswadayaan masyarakat) mempunyai hak dan Kewajiban yang sama, di pilinya koordinator bertujuan untuk mempermudah kinerja LKM (Lembaga Kswadayaan masyarakat).

Setelah LKM terbentuk disusunlah PJM Proangkis, PJM Pronangkis adalah perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. PJM pronangkis berisi tentang Visi warga kelurahan/desa untuk kurun waktu tertentu, Rencana satu tahun (Renta) pertama, Komitmen dari aparat kelurahan untuk menjadikan PJM Pronangkis sebagai

bagian dari RPJM Desa/kelurahan, beserta seluruh hasil Pemetaan swadaya digunakan untuk lampiran PJM Pronangkis.

Setelah PJM Pronangkis selesai dilanjutkan dengan penyepakatan hasil PJM yang dihadiri oleh ketua RT, seluruh anggota LKM dan pemerintah kelurahan. Dan sosialisasi hasil dilakukan bersamaan dengan penyepakatan hasil untuk menghemat biaya BOP LKM. Sehingga LKM bekerja berdasarkan Anggaran dasar yang telah dibuat sejak awal pertama kali dibentuk yang telah disahkan oleh notaris. Dan LKM menentukan kegiatan dan penerima manfaat kegiatan berdasarkan PJM Pronangkis. Melalui kegiatan siklus terbentuknya sebuah lembaga yang melibatkan seluruh masyarakat dalam segala proses kegiatannya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh UPK adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengajuan pinjaman. Pelaksanaan pengajuan pinjaman di kelurahan panggungrejo sudah sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir di Kelurahan Panggungrejo meliputi proses: Pengajuan pinjaman dapat dilakukan seluruh masyarakat yang mempunyai KTP beralamatkan di kelurahan Panggungrejo dan masuk dalam daftar jiwa miskin dalam PJM Pronangkis. Membentuk kelompok KSM . Sifat pinjaman dalam ekonomi bergulir PNPM andiri Perkotaan bersifat tanggungrenteng.

Proses pemeriksaan pinjaman dilakukan oleh UPK. proses pemeriksaaan ini meliputi pengecekan kelengkapan data dan menjelaskan tentang ketentuan pinjaman bergulir, pinjaman bukan hibah, kewajiban tanggungrenteng dan kewajiban menabung di UPK. Di kelurahan Panggungrejo petugas pinjaman tidak melakukan pemeriksaaan lapang dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Setiap peminjam baru dipukul rata hanya isa meminjam perorang satu juta rupiah, jika angsuran lancar dan memiliki tabungan, KSM tersebut akan mendapat fasilitas pengajuan dana selanjutnya.

Persetujuan pinjaman dilakukan UPK panggungrejo jika anggota KSM yang meminjam tersebut mempunyai catatan baik menurut penilaian masyarakat, karena luas kelurahan Panggungrejo tidak terlalu luas sehingga karekter orang

bisa diketahui. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemacetan dana di masyarakat. Dan syarat utama peminjam adalah mempunyai usaha dan berpenghasilan, sehingga mereka dapat mengangsur dengan rutin. Jika mereka tidak sesuai dengan persyaratan tersebut mereka tidak memperoleh pinjaman. Hal tersebut tidak ada dalam ketentuan tapi hal tersebut adalah kesepakatan LKM untuk menjaga keuangan di UPK.

Tahap realisasi dilakukan setelah KSM tersebut melengkapi berkas pinjaman yang telah diverifikasi UPK, KSM menerima dana dengan menandatangani surat perjanjian bermaterai Rp 6000 (1 set) dan bukti kas keluar sebagai penerimaan uang. Pembinaan KSM di panggungrejo tidak dilakukan karena UPK yang sibuk bekerja dan LKM yang kurang memahami dan terlalu percaya kepada masyarakat atau KSM yang meminjam.

Tahap pembayaran angsuran , pengangsuran di kelurahan Panggungrejo dilaksanakan sekitar tanggal 22 setiap bulan, Pembayaran angsuran terdiri dari Pokok, Jasa, dan tabungan. Jika KSM yang bersangkutan pada bulan tersebut dalam kondisi keuangan yang kurang mereka boleh hanya membayar pokok dulu dan pembayaran Jasa dan tabungan bisa di bayarkan bersamaan dengan angsuran bulan berikutnya. Pembayaran angsuran sesuai ketentuan seharusnya dilakukan di kantor sekretariat LKM, namun karena kondisi ruang sekretariat yang kurang memadai maka kegiatan pengangsuran dan pencairan berada di rumah UPK. Saat pengangsuran KSM hanya memberikan uang kepada UPK tanpa mendapat bukti pembayaran sehingga sangat dikhawatirkan jika suatu saat ada hal-hal yang tidak di inginkan sulit dalam pengecekan dan bukti.

Semua proses tersebut dilakukan oleh UPK. Selain mengawal proses pencairan dana ke KSM , UPK juga harus menyusun pelaporan keuangan setiap bulanya.

Proses pembukuan yang dikerjakan oleh UPK diantaranya meliputi :

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan kedalam bukti transaksi
2. Mencatat semua transaksi keuangan dalam catatan uang masuk dan catatan uang keluar

3. Mengelompokkan dan membukukan transaksi keuangan dalam buku bank, buku harian kas dan atau buku inventaris
4. Meringkas saldo-saldo dalam catatan uang masuk dan catatan uang keluar, serta bukti pemindah bukuan dalam buku besar dan neraca saldo , buku pendapatan dan biaya
5. Menyesuaikan saldo buku besar dengan informasi terakhir yang disebut dengan jurnal penyesuaian
6. Menyusun laporan keuangan neraca dan laba rugi

Dalam mengamati kegiatan pembayaran angsuran , Angsuran dibayarkan di rumah UPK pada tanggal 22 sesuai dengan jatuh tempo pembayaran angsuran ada beberapa KSM yang mengangsur tidak membawa kartu pinjaman , hanya membawa uang dan memberikan kepada UPK dan mereka mendapat kwitansi pembayaran. Saat pembayaran angsuran ada KSM yang membayar angsuran secara kolektif ada yang perseorangan.

Dalam proses review, kegiatan LKM dicek dengan form-form yang telah disediakan program PNPM Mandiri perkotaan. Review keuangan ditujukan kepada UPK dan Sekretaris LKM yang membawa dana/uang . Review Program ditujukan kepada LKM untuk meriview atau melihat kembali Program yang telah dijalankan dengan Pedoman PJM Pronangkis, Jika ada usulan baru terkait kegiatan ekonomi, Lingkungan dan sosial atau warga miskin berkurang atau bertambah dimasukkan kedalam laporan review program

Dalam proses review, kegiatan LKM dicek dengan form-form yang telah disediakan program PNPM Mandiri perkotaan. Review keuangan ditujukan kepada UPK dan Sekretaris LKM yang membawa dana/uang . Review Program ditujukan kepada LKM untuk meriview atau melihat kembali Program yang telah dijalankan dengan Pedoman PJM Pronangkis, Jika ada usulan baru terkait kegiatan ekonomi, Lingkungan dan sosial atau warga miskin berkurang atau bertambah dimasukkan kedalam laporan review program. Selain review bentuk pemantauan yang dapat dilihat masyarakat dengan diadakanya RWT atau rembug warga tahunan. Dalam acara ni semua perwakilan RT di undang untuk mendengarkan laporan Kegiatan LKM selama 1 tahun. menyepakati hasil review,

selain itu juga dibacakan kondisi keuangan LKM dan seluruh KSM yang macet juga dibacakan untuk memberi efek malu dan segera mengangsur. Berdasarkan hasil observasi dari berita cara dan daftar hadir Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan RWT ada 53 orang yang hadir ke kelurahan terdiri dari 25 laki –laki dan 28 perempuan. Selain itu untuk meneliti keuangan UPK dan Sekretariat di tahun berikutnya juga dilaksanakan Audit independen dengan mendatangkan Akuntan Publik yang dibiayai dari dana Biaya operasional LKM. Kelurahan Panggungrejo telah mengadakan audit Independen pada bulan Februari 2016 oleh AP Irvan dan Rakhmawan dari Surabaya. Dan dalam hasilnya tidak ditemukan penyalahgunaan keuangan namun pembukuan yang dilakukan kurang lengkap dan perlu dibenahi.

PEMBAHASAN

Di kelurahan Panggungrejo kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi di kelurahan sedikit dikarenakan mereka merasa sibuk dan kegiatan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Pembentukan tim Refleksi perkara kritis dilaksanakan pada saat sosialisasi tingkat kelurahan untuk menyingkat waktu dan menghemat pembiayaan Pelaksanaan Refleksi perkara kritis tingkat RT dilaksanakan saat ada yasinan RT sehingga peserta yang hadir banyak, dilihat dari peserta memang banyak dan menghemat pendanaan namun secara penyampaian materi kurang maksimal dikarenakan keterbatasan waktu. Dalam acara tersebut di sampaikan tujuan dari kegiatan Refleksi perkara Kritis (RPK)

Di tingkat basis atau RT pelaksanaan Refleksi perkara Kritis (RPK) seharusnya diadakan dalam bentuk FGD (*focus group discussion*) yang dilakukan oleh 3 kelompok yakni kelompok perempuan, kelompok miskin dan kelompok non miskin. Melalui pengelompokan ini agar ada keterbukaan sesama anggota FGD dalam memaknai apa akar dari kemiskinan, kriteria seseorang dikatakan miskin itu yang seperti apa, untuk memunculkan kesadaran dan kepedulian serta kesepakatan bersama menanggulangi kemiskinan. Namun karena sangat sulit untuk mengelompokkan miskin, non miskin, di tempat orang yasinan maka pengelompokannya sesuai tempat duduk terdekat.

Untuk penyepakatan hasil dilaksanakan dalam rapat rutin LKM (Lembaga Kswadayan masyarakat, kegiatan tersebut dilakukan kurang maksimal karena yang hadir hanya anggota LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Untuk sosialisasi hasil tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan tenaga para relawan, dan masih ada kegiatan siklus yang selanjutnya.

Di kelurahan Panggungrejo kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi Pemetaan Swadaya sedikit dikarenakan mereka merasa sibuk dan kegiatan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Pembentukan tim Pemetaan Swadaya dilaksanakan pada saat sosialisasi tingkat kelurahan untuk meningkatkan waktu dan menghemat pembiayaan.

Pelaksanaan Pemetaan Swadaya di tingkat RT secara teknisnya sesuai dengan pemahaman RT masing-masing, yang terpenting output dari kegiatan pemetaan swadaya bisa tercapai. Di kelurahan Panggungrejo memiliki 12 RT Setelah semua RT melaksanakan kegiatan tersebut data dari masing-masing RT dikumpulkan dan diadakan penyepakatan di tingkat kelurahan. Sosialisasi hasil juga tidak dilaksanakan di dalam kegiatan Pemetaan Swadaya. karena waktu pemetaan swadaya sudah memakan waktu yang lama sedangkan siklus yang harus diselesaikan masih banyak.

Pengorganisasian LKM merupakan kegiatan yang paling banyak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya . Diawali dari sosialisasi tingkat kelurahan , sosialisasi kelurahan dilaksanakan bersamaan rapat rutin LKM namun di tambah dengan mengundang ketua RT, dalam acara tersebut dibarengi dengan acara pembentukan panitia Pemilihan ulang LKM ditingkat RT. Dalam acara tersebut terpilih 36 orang sebagai panitia pemilihan ulang LKM yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

Proses pemilihan ulang mulai dari tingkat RT diawali dengan pembacaan kriteria pemimpin yang telah disepakati pada saat hasil pemetaan Swadaya. Selanjutnya setiap orang yang mempunyai hak pilih dalam pemilu, memilih 3 orang di RT nya yang memenuhi kriteria tersebut selanjutnya dari nama nama yang telah ditulis oleh masyarakat di rangking antara 1 sampai 5 , orang yang masuk rangking tersebut wajib hadir ke balai kelurahan untuk mengikuti Pemilu

tingkat kelurahan. Dalam pemilu kelurahan warga yang hadir merupakan seluruh masyarakat utusan dari masing masing RT beserta tokoh masyarakat dan pemerintah kelurahan yang diundang ke balai kelurahan.

PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan pespektif waktu 3 tahun dari suatu program pengagulangan kemiskinan di suatu kelurahan. PJM Pronangkis ini kemudian di jabarkan menjadi Renta (rencana tahunan) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan (Yuwono, 2012: 44).

Pelaksanaan pengajuan pinjaman di kelurahan panggungrejo sudah sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan kegiatan ekonomi bergulir di Kelurahan Panggungrejo meliputi proses: Pengajuan pinjaman dapat dilakukan seluruh masyarakat yang mempunyai KTP beralamatkan di kelurahan Panggungrejo dan masuk dalam daftar jiwa miskin dalam PJM Pronangkis. Membentuk kelompok KSM . Sifat pinjaman dalam ekonomi bergulir PNPM andiri Perkotaan bersifat tanggungrenteng.

Sebelum meminjam masing anggota KSM mengisi Balangko pengajuan KSM yang ditandatangani suami istri dan pada kolom bawah mengetahui ketua KSM, Setelah itu dilengkapi beita acara pembentukan KSM, aturan main KSM, Foto kopi KTP masing masing KSM, Blangko pengajuan pinjaman anggota KSM, Surat Kuasa pencairan tabungan tanggungrenteng. Dan menyerahkan Blanko Permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya diberikan kepada UPK.

Proses pemerikasaan pinjaman dilakukan oleh UPK. proses pemeeriksaaan ini meliputi pengecekan kelengkapan data dan menjelaskan tentang ketentuan pinjaman bergulir, pinjaman bukan hibah, kewajiban tanggungrenteng dan kewajiban menabung di UPK. Di kelurahan Panggungrejo petugas pinjaman tidak melakukan pemeriksaaan lapang dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Setiap peminjam baru dipukul rata hanya isa meminjam perorang satu juta rupiah, jika angsuran lancar dan memiliki tabungan, KSM tersebut akan mendapat fasilitas pengajuan dana selanjutnya.

Persetujuan pinjaman dilakukan UPK panggungrejo jika anggota KSM yang meminjam tersebut mempunyai catatan baik menurut penilaian masyarakat, karena luas kelurahan Panggungrejo tidak terlalu luas sehingga karakter orang bisa diketahui. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemacetan dana di masyarakat. Dan syarat utama peminjam adalah mempunyai usaha dan berpenghasilan, sehingga mereka dapat mengangsur dengan rutin. Jika mereka tidak sesuai dengan persyaratan tersebut mereka tidak memperoleh pinjaman. Hal tersebut tidak ada dalam ketentuan tapi hal tersebut adalah kesepakatan LKM untuk menjaga keuangan di UPK. Pembinaan KSM di panggungrejo tidak dilakukan karena UPK yang sibuk bekerja dan LKM yang kurang memahami dan terlalu percaya kepada masyarakat atau KSM yang meminjam.

Tahap pembayaran angsuran , pengangsuran di kelurahan Panggungrejo dilaksanakan sekitar tanggal 22 setiap bulan, Pembayaran angsuran terdiri dari Pokok, Jasa, dan tabungan. Sehingga dibutuhkan pengawas dalam pelaksanaan ekonomi bergulir untuk menghindari kemacetan dan penyalahgunaan keuangan. Kelengkapan dalam pengerjaan laporan diperlukan agar semua jelas dan pembukuan mudah dipahami jika sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi seluruh pihak dalam pelaksanaan ekonomi bukti sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan keuangan, karena keuangan ini milik masyarakat. Partisipasi masyarakat yaitu dengan mengangsur tepat waktu, menggunakan uang pinjaman untuk usaha, bisa lebih berkembang setelah mendapat pinjaman. Partisipasi UPK yaitu dengan mengerjakan laporan tepat waktu, tidak menyalahgunakan keuangan, memilih KSM calon peminjam dengan sehati-hati mungkin untuk mencegah kemacetan. Partisipasi LKM yaitu dengan mengawasi kinerja UPK, mencari pengawas, ikut menagih KSM yang macet, serta sering mengadakan rapat rutin untuk memantau kegiatan ekonomi bergulir , karena mulai tahun 2015 sampai sekarang belum ada dana BLM (Bantuan langsung masyarakat) sehingga satu satunya sumber dana yang dapat menjalankan kegiatan LKM di tingkat kelurahan adalah Kegiatan ekonomi bergulir yang dikelola UPK.

Dalam proses pelaksanaan ekonomi bergulir dana yang mengendap di bank cukup besar, warga yang mengajukan pinjaman ke UPK juga banyak, namun tidak diadakan pencairan untuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) baru, hal ini dikarenakan rekomendasi dari fasilitator agar penanganan KSM yang macet lebih diutamakan untuk menyehatkan keuangan UPK terlebih dahulu. Jika nanti seluruh KSM yang dikelola UPK telah lancar.

Monitoring dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan dari UPK ke masyarakat peminjam. Sebagai bentuk kontrol terhadap keuangan UPK, UPK wajib menempelkan laporan bulanan UPK di 5 titik kelurahan yang bisa di baca oleh masyarakat. Namun hal tersebut belum dilaksanakan UPK. Monitoring administratif dilakukan UPK sendiri karena di kelembagaan LKM SIDO MAKMUR tidak memiliki Pengawas

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan cukup baik ini dibuktikan dengan banyaknya kehadiran masyarakat dalam rangkaian kegiatan pemantauan, namun masyarakat kurang aktif dalam kegiatan –kegiatan pemantauan, hal ini disebabkan masyarakat kurang paham dalam kegiatan pemantauan mereka hanya mengikuti saja tanpa mengetahui makna dari kegiatan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan merupakan isu sentral di tanah air terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional. Pemerintah menanggulangi kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah program pemerintah yang memberdayakan masyarakat di tiga bidang yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari ketiga kegiatan tersebut kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang terus berjalan dan berkembang sampai saat ini walaupun program PNPM Mandiri Perkotaan telah berakhir di tahun 2015. Partisipasi semua pihak diperlukan untuk mempertahankan kegiatan ekonomi bergulir. Di kelurahan Panggungrejo bulan April 2016 ada dana ekonomi bergulir yang mengendap di bank sebesar Rp 44.038.987,00. Partisipasi kegiatan ekonomi bergulir diatur dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam perencanaan

ekonomi bergulir, kegiatan perencanaan dilakukan mulai tingkat kelurahan dan tingkat basis kehadiran partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat semakin sedikit dari tahun ketahun. Sosialisasi hasil rapat tidak pernah diadakan sehingga masyarakat kurang memahami program. Masyarakat tidak runtut dalam mengikuti kegiatan perencanaan sehingga mereka tidak tahu maksud dan tujuan tahapan perencanaan. Dalam pelaksanaan ekonomi bergulir di sudah sesuai dengan pedoman namun karena masyarakat kurang memahami program tidak adanya pengawas dalam struktur LKM juga memberatkan kinerja UPK, dana mengendap dikarenakan banyak kelompok yang menunggak dalam mengangsur sehingga rekomendasi dari fasilitator agar KSM peminjam di tertibkan terlebih dahulu sebelum ada pencairan dana kepada KSM yang baru. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi juga sudah dilakukan dengan mengikuti kegiatan RWT namun penempelan di 5 titik tidak dilakukan sehingga pemantauan oleh masyarakat tidak bisa berjalan rutin tiap bulan.

Saran untuk fasilitator

1. Agar selalu memotivasi seluruh anggota pimpinan kolektif LKM (Lembaga Kswadayaan Masyarakat) untuk mengadakan rapat secara rutin sehingga fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat selaku *agent* perubahan dapat terealisasi.
2. Agar disaat mengadakan pertemuan LKM (Lembaga Kswadayaan Masyarakat), Fasilitator memberi tahu tujuan dan manfaat dari semua kegiatan yang mereka jalankan sehingga mereka dapat memahami semua kegiatan yang mereka lakukan dan dapat meningkatkan partisipasinya.

Saran untuk LKM (Lembaga Kswadayaan Masyarakat)

1. Agar segera memilih pengawas untuk meringankan pekerjaan UPK.
2. Agar semua anggota LKM meningkatkan partisipasinya dalam setiap rapat-rapat pengambilan keputusan dengan menyampaikan aspirasinya selaku perwakilan masyarakat.
3. Agar menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang tujuan utama dari ekonomi bergulir.

4. Agar menyebarluaskan ada kegiatan ekonomi bergulir di kelurahan Panggungrejo sehingga dana yang mengendap di bank dapat bergulir.
5. Agar selalu mengadakan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat tentang ekonomi bergulir, pemanfaatan, dan pengelolaannya secara benar.
6. Agar hadir dalam setiap pencairan dana ekonomi bergulir sehingga pelaksanaan ekonomi bergulir dapat terpantau.
7. Agar membenahi kantor sekertariat, agar berfungsi secara optimal
8. Agar melaksanakan semua kegiatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman PNPM Mandiri perkotaan.

Saran untuk UPK (Unit Pengelola Keuangan)

1. Agar selalu menjunjung tinggi kejujuran karena UPK adalah orang kepercayaan masyarakat sebagai pengelola dana ekonomi bergulir .
2. Memberi kartu pinjaman kepada KSM saat pencairan
3. Selalu memberi kwitansi, atau bukti kas masuk kepada KSM yang mengangsur.
4. Agar saat melakukan pencairan dengan menghadirkan LKM, agar LKM dapat ikut memantau dan meningkatkan partisipasinya sebagai LKM
5. Agar memberi wawasan kepada KSM saat pencairan agar mereka mengangsur rutin setiap bulan.
6. Menghadirkan seluruh anggota KSM saat pencairan, agar masing-masing anggota KSM lebih mempunyai tanggungjawab.
7. Menempelkan laporan bulanan di 5 titik secara rutin agar masyarakat mengetahui perkembangan UPK.

Saran Untuk KSM ekonomi Bergulir

1. Agar dana yang diperoleh benar-benar digunakan sebagaimana tujuan sewaktu mengajukan permohonan ekonomi yaitu untuk kegiatan mengembangkan usaha.
2. Agar rutin mengangsur pinjaman setiap bulan dan tepat waktu karena laba dari kegiatan ekonomi bergulir kembali lagi ke masyarakat.

3. Aktif menjalin komunikasi dengan UPK dan LKM mengenai perkembangan usaha dan kesulitan melunasi tagihan kredit agar dapat dicari solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi para anggota KSM.

Daftar Rujukan

- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Penada Media Group
- Creswell, John W. 2008. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*. Bandung : Pustaka Pelajar
- Hamidi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif , Pendekatan Pratis, Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Hartono, guratno. 2012. *Pedoman teknis kegiatan tridaya (sosial, ekonomi & lingkungan)*. Jakarta: Direktorat Jendral cipta karya-kementrian pekerjaan umum
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Manab. Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia
- Simadjuntak & Pasaribu.1982. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- Suharto, Edi.2010. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Theresia, A dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat. Acuan Bagi Praktisi, Akademisi Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Yuwono. Budi. 2012. *Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya-Kementrian Pekerjaan Umum